

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan

Penguatan Kapasitas Ekonomi dan Partisipasi Politik Perempuan Desa Sebagai Upaya Keluar Dari Jeratan Kemiskinan

Strengthening Village Women's Economic Capacities and Political Participation to Break the Poverty Trap

Penulis

Devy Dhian Cahyati dan Anastasia Imelda Cahyaningrum

Editor dan Pengulas Naskah

Volume Editors and Reviewers

Amalinda Savirani

Rachael Diprose

Annisa Sabrina Hartoto

Ken M.P. Setiawan

Penyunting dan Penerjemah Naskah

Copy Editors

Annisa Sabrina Hartoto

Bronwyn Beech Jones

Untuk merujuk studi kasus ini:

Cahyati, D.D., dan Cahyaningrum, A.I., 2020. Penguatan Kapasitas Ekonomi dan Partisipasi Politik Perempuan Desa Sebagai Upaya Keluar Dari Jeratan Kemiskinan [Strengthening Village Women's Economic Capacities and Political Participation in Efforts to Break the Poverty Trap]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 88-110. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. *Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

To cite this case study:

Cahyati, D.D., and Cahyaningrum, A.I., 2020. Penguatan Kapasitas Ekonomi dan Partisipasi Politik Perempuan Desa Sebagai Upaya Keluar Dari Jeratan Kemiskinan [Strengthening Village Women's Economic Capacities and Political Participation in Efforts to Break the Poverty Trap]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 88-110. <https://doi.org/10.46580/124328>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. *Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124326>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Ringkasan

Studi kasus ini mengeksplorasi bagaimana perempuan di desa penelitian di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara secara kolektif berusaha keluar dari jeratan kemiskinan, dan mengadvokasikan perubahan agar tata Kelola pemerintahan di desa lebih inklusif gender. Di tengah kondisi desa dengan sumber daya alam yang terbatas, perempuan tidak memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh penghasilan ataupun mengembangkan diri. Selain itu, perempuan juga tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan terkait agenda pembangunan desa. Kehadiran Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan kelompok-kelompok perempuan yang terbentuk di desa ini, yakni Kelompok Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), memberikan harapan dan pilihan baru bagi perempuan desa yang selama ini menghadapi persoalan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi menjadi pintu masuk pengorganisasian kegiatan kolektif perempuan desa. Untuk menyatukan perempuan desa, PEKKA mendorong perempuan untuk membentuk kelompok Pekka, yakni kelompok simpan pinjam dengan nama Kelompok Papadaan. Kelompok Papadaan memberikan kesempatan bagi perempuan desa, terutama para perempuan kepala keluarga, untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dan mendapatkan pelatihan usaha, agar mereka bisa mandiri dan memiliki penghasilan. Selain itu, Kelompok Papadaan ini menjadi wadah untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Dalam perjalanannya, perempuan desa yang masih bersuami memiliki ketertarikan untuk bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok simpan pinjam. Agar keanggotaan lebih bersifat inklusif, PEKKA lalu membentuk Kelompok Pekka “luar biasa” yang terdiri dari perempuan bersuami yang turut menopang perekonomian keluarga. Di desa ini, anggota kelompok “luar biasa” membentuk kelompok yang diberi nama Kelompok Setia Kawan.

Dengan bergabung dalam organisasi kolektif perempuan, perempuan desa telah membangun kapasitas diri mereka, baik keterampilan praktis, organisasional, maupun kemampuan untuk membawa perubahan. Mereka sekarang telah mempunyai kepercayaan diri dalam berpartisipasi di ruang publik, berinteraksi dengan institusi publik, dan berdaya secara ekonomi. Melalui pertemuan rutin kelompok, mereka berlatih kemampuan berbicara di depan umum, dan juga memperoleh sejumlah keterampilan nyata lainnya. Melalui Akademi Paradigma, mereka belajar mengenai sistem pemerintahan dan anggaran desa, dan juga mengenai cara-cara advokasi kebijakan kebutuhan perempuan di desa. Perempuan desa juga berhasil membangun jaringan dengan perempuan lainnya, juga dengan tokoh pemimpin dan tokoh penting yang lainnya di desa.

Keberadaan kelompok perempuan yang didukung oleh PEKKA ini kemudian berhasil membawa perubahan signifikan bagi perempuan desa. *Pertama*, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digagas oleh perempuan anggota Kelompok Pekka sebagai upaya untuk pemberdayaan ekonomi desa. Pendirian BUMDes ini dilegalkan dalam Perdes Nomor 4 Tahun 2015. Dalam proses penyusunan Perdes ini, perempuan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. *Kedua*, partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa ini juga berhasil meningkatkan alokasi anggaran desa untuk program dan kegiatan perempuan, serta memastikan keterwakilan politik perempuan dalam musyawarah desa. Melalui keterlibatan mereka dalam Musdes, perempuan desa berhasil mengajukan usulan alokasi Dana Desa untuk pemenuhan berbagai kebutuhan mereka, seperti pengadaan alat kesehatan dan kesenian, serta untuk kegiatan Posyandu. Keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa pun berhasil diresmikan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelibatan Perwakilan Organisasi Perempuan Dalam Musrenbangdes Kecamatan Sungai Pandan.

Ketiga, perempuan yang tergabung dalam Kelompok-kelompok Pekka juga telah membantu mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat desa dengan membantu masyarakat desa agar dapat memiliki identitas kependudukan yang legal guna mengakses program perlindungan sosial, dengan mengadakan Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK). KLIK ini bertujuan memberikan layanan informasi dan konsultasi identitas hukum dan permasalahan rumah tangga, serta persoalan perlindungan sosial.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendorong perempuan desa dalam kegiatan kolektif dan memengaruhi pembangunan desa. Perempuan desa di Hulu Sungai Utara tidak hanya mengembangkan kapasitas ekonomi dan politiknya secara individual, namun juga memiliki peran yang lebih kuat dalam pembangunan dan penyusunan kebijakan di desa.

Summary

This case study examines how women in a village in North Hulu Sungai district in South Kalimantan have worked collectively to economically empower themselves and advocate for change so village governance is more inclusive. In this village natural resources are scarce and livelihood opportunities are limited. Women not only have had limited livelihood and self-development opportunities, but they also have not been involved in decision-making processes about village development. The arrival of the Female-Headed Families Empowerment Foundation (*Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga* or PEKKA) and the women's groups it established—Pekka (female heads of families) unions—provided new hope and options for women facing severe economic challenges.

Economic empowerment activities were the entry point for organising village women in the North Hulu Sungai research village. PEKKA encouraged women to form a Pekka union savings and loans group called the Papadaan Group. This group has provided opportunities for village women, especially the female heads of families (such as widows), to access loans and get business training so that they can earn an independent income. Moreover, this group has become the vehicle through which women have participated in village development decision making. Due to the popularity of this savings and loans group, married women also expressed interest in joining the group and its activities. PEKKA responded flexibly in the spirit of inclusiveness, forming a new category of membership called “extraordinary” PEKKA members. These married women who contribute to their family economies then formed another group, known as the Setia Kawan (Loyal Friends) group.

Through joining these women's collectives, women in the village have built *both* their practical and organisational and influencing skills and now have the self-confidence to increase their participation in the public sphere, interact with public institutions, and are increasingly empowered economically. In regular group meetings they have practiced public speaking but have also learned a variety of other more tangible skills. By participating in PEKKA's Paradigta Academy, some women have also learned about government systems, village budget processes, and advocacy strategies to voice women's policy needs in their village. They have also built networks with other women and with influential village and other leaders.

Such women's groups, with the support of PEKKA, have created significant change. PEKKA women initiated the establishment of a village-owned enterprise (BUMDes) to develop the village economy, which was legalised through Village Regulation No. 4, 2015. To draft the Village Regulation, village women in North Hulu Sungai worked together with village, sub-district and district governments. Women's participation in village development has increased the allocation of village budget for women's programs and activities and ensured women's political representation in village meetings. In village meetings (Musdes), women in the North Hulu Sungai research village have successfully made proposals for village budget allocations to procure medical equipment, fund the Posyandu (maternal and child health clinic), and purchase musical instruments. The participation of women in village meetings has also been codified through Village Head Decision No. 5, 2019 about the involvement of women's organisation representatives in development planning meetings (Musrenbang).

Members of Pekka women's union groups also have assisted community members to apply for legal identity documents so that they can access government social protection programs through PEKKA's Village Consultation and Information Service Clinic (*Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi* – KLIK). This clinic provides information and consultation services for issues about legal identity, marital and domestic problems, and access to social protection programs.

This case study shows how economic empowerment activities can be an effective strategy in encouraging rural women undertake collective action and influence village development, governance and wider change. Women in North Hulu Sungai have developed their economic and political capacity and strengthened their role in their community's development and village government policy.

Pendahuluan

Studi kasus ini menjelaskan tentang upaya perempuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan di sebuah desa di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.¹ Desa yang terletak di tepi sungai ini memiliki luas wilayah yang sangat kecil dengan topografi berupa rawa. Warga desa tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan yang dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan. Keterbatasan sumber ekonomi, sulitnya akses pendidikan dan kesehatan, menjadi persoalan bagi masyarakat desa, termasuk perempuan.

Studi kasus ini mengeksplorasi munculnya gerakan kolektif perempuan di desa penelitian, khususnya setelah adanya pendampingan dari PEKKA (Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap persoalan perempuan kepala keluarga. Gerakan kolektif perempuan yang terbentuk berkontribusi dalam memperkuat ekonomi perempuan sehingga dapat keluar dari belenggu kemiskinan. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama membahas mengenai konteks sosial dan ekonomi desa. Bagian kedua menguraikan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi ini menimbulkan permasalahan kemiskinan, terutama keterbatasan kesempatan perempuan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi. Bagian ketiga studi kasus ini memaparkan bagaimana keberadaan kelompok perempuan, yang dibantu pendiriannya oleh PEKKA, menciptakan peluang untuk peningkatan kapasitas perempuan, menciptakan peluang ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan inisiasi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diamanatkan melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 di tingkat nasional. Bagian keempat menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi di desa melalui gerakan kolektif perempuan, yaitu pendirian BUMDes melalui Perdes No. 04 Tahun 2015 dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Dengan terlibat di dalam kelompok perempuan tersebut, perempuan desa kini memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di ruang publik, berinteraksi dengan institusi publik, serta berdaya secara ekonomi.

“Ada sih rasa ga percaya diri. Tapi mba, alhamdulillah, sering ngomong- ngomong gitu, sekarang sedikit-sedikitlah bisa ngomong gitu. Iya ga percaya diri seperti, kayaknya orang bodoh gitu. Sekarang berani ngomong, berani curhat, sama-sama teman gitu, kayaknya wawasannya luas, bisa diajak jalan-jalan ke Alabio, ke kecamatan, alhamdulillah diajak musrembang.” (Farah, Ketua Kelompok Pekka Setia Kawan, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

1. Konteks Sosial dan Ekonomi Desa

Desa yang menjadi studi kasus ini merupakan desa kecil yang terletak di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa ini berada di tepi Sungai Kalinegara, sungai kecil yang menjadi anak Sungai Barito. Sungai ini memiliki fungsi penting bagi masyarakat desa, yaitu untuk usaha perikanan. Secara demografis, desa yang merupakan desa hasil pemekaran pada tahun 1980an ini dihuni 101 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk yaitu 326 penduduk, yang terdiri dari 167 penduduk laki-laki dan 159 penduduk perempuan (Pemerintah Desa, 2015a).

Desa ini memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Pasalnya, dari 101 Kepala Keluarga, tercatat sebanyak 66 Kepala Keluarga masuk pada kategori Kepala Keluarga Miskin. Kemiskinan di desa ini disebabkan karena terbatasnya mata pencaharian dan minimnya sumber daya desa. Dari jumlah total penduduk, 37,03% bekerja sebagai buruh tani dan 24,69% bekerja sebagai petani (Pemerintah Desa, 2015a). Baik petani maupun buruh tani di desa ini mengandalkan musim kemarau untuk dapat bertani. Dengan bentang lahan berupa rawa, lahan pertanian hanya bisa dimanfaatkan satu kali dalam setahun ketika air rawa surut. Kondisi ini menjadikan pertanian kurang potensial untuk memajukan perekonomian desa.

Untuk mendapatkan penghasilan tambahan ketika musim penghujan, masyarakat mencari ikan di rawa dan di sungai. Bahkan, ada warga yang sengaja membuat sumur di sawahnya untuk memelihara ikan. Sehingga

¹ Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.

meskipun rawa kering di musim kemarau, ikan-ikan tetap bisa hidup di dalam sumur.² Namun, sebagian besar warga mencari ikan bukan untuk diperjualbelikan dalam skala besar. Ikan yang mereka dapatkan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan makan keluarga, apabila mendapatkan ikan berlebih maka akan dijual kepada tetangga.

Adanya proyek pembangunan desa menjadi peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Misalnya, proyek pembuatan jalan, Jalan Usaha Tani (JUT), lumbung padi, dan lantai jemur. Model swakelola memang menjadi kebijakan pemerintah nasional untuk memaksimalkan potensi desa, baik bahan material maupun tenaga kerja (Tempo.co, 2017). Proyek pembangunan desa dapat menjadi alternatif pekerjaan ketika tidak ada pekerjaan lain. Suami Yati dan Lala misalnya, memilih bekerja di proyek desa untuk mendapatkan penghasilan lebih besar, dibanding ketika mereka hanya mengandalkan pendapatan dari hasil memancing.³

Di bidang pendidikan dan kesehatan, masyarakat desa ini masih memiliki beberapa persoalan. Secara spesifik desa ini tidak memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti gedung-gedung sekolah tingkat lanjut. Gedung pendidikan tingkat lanjut berada di desa lain sehingga cenderung sulit bagi masyarakat dengan pendapatan ekonomi rendah untuk mengakses, baik dalam hal jarak maupun secara finansial. Hal ini menjadi salah satu alasan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di desa. Di bidang kesehatan, desa ini memiliki beberapa peluang dan tantangan pembangunan. Saat ini telah dibangun Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagai tempat dilakukannya kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu desa juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan Puskesmas Kecamatan. Namun hingga saat ini, belum terdapat tenaga ahli yang memadai seperti bidan desa. Bidan desa yang sebelumnya ditugaskan di desa ini mengundurkan diri dan beralih pekerjaan.

Norma sosial di desa tidak banyak berpengaruh terhadap pembatasan maupun dorongan keterlibatan perempuan. Tidak ada larangan, baik secara formal maupun informal, bagi perempuan untuk keluar pada malam hari, misalnya. Tapi hal ini juga tidak semata-merta mendorong keterlibatan perempuan di ruang-ruang publik. Minimnya pengetahuan perempuan desa dalam berorganisasi banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perempuan desa yang cukup rendah. Desa ini juga tidak memiliki norma sosial yang secara spesifik meminggirkan perempuan ke peran-peran domestik. Meskipun demikian, saat ini kebanyakan perempuan desa tinggal di rumah. Kondisi ini lebih banyak dipengaruhi oleh minimnya lapangan pekerjaan di desa. Pasalnya, tidak banyak pilihan lapangan pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh perempuan desa. Minimnya pilihan dalam bekerja juga secara tidak langsung memengaruhi angka perkawinan anak yang cukup tinggi di desa. Lebih lanjut, banyak perempuan yang menganggap pernikahan merupakan jalan keluar dari persoalan minimnya lapangan pekerjaan.⁴

2. Permasalahan Perempuan Desa

Hidup di desa yang kecil dan memiliki sumber daya yang terbatas dapat menjadi kendala bagi perempuan untuk mengembangkan diri. Bagian ini akan menguraikan bagaimana perempuan memiliki kesempatan yang terbatas untuk membangun kapasitas ekonomi sebagai sumber penghidupan. Selain itu, bagian ini juga akan memaparkan hambatan perempuan untuk berpartisipasi dalam rapat desa dan pembuatan keputusan desa.

Pekerjaan yang tersedia untuk perempuan di desa sangatlah terbatas. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh tani dan sebagai ibu rumah tangga. Data desa menyebutkan pekerjaan ibu rumah tangga sebesar 26.5% (Pemerintah Desa, 2015a). Untuk menambah penghasilan keluarga, perempuan biasanya bekerja sebagai pengupas bawang merah, pembersih kulit rotan maupun membuat ikan asin. Beberapa ibu-ibu menyebut pekerjaan mengupas bawang merah dengan upah Rp500,00/kg sebagai pekerjaan sampingan. Mereka bekerja di

² Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

³ Wawancara Intan, salah satu perempuan non Pekka, desa penelitian di HSU, 16 Juli 2019.

⁴ Wawancara Intan, salah satu perempuan non Pekka, desa penelitian di HSU, 16 Juli 2019.

depan rumah sembari mengawasi anak-anak bermain di sekitar rumah. Lebih dari itu, pekerjaan ini memungkinkan mereka bertemu dan berkumpul dengan perempuan lain. Tradisi berkumpul secara informal memang sering dilakukan oleh perempuan di desa, salah satunya melalui tradisi *mancok* (memakan rujak) bersama di depan rumah.

Perempuan juga tidak mendapatkan peran yang strategis dalam pembangunan desa. Meskipun jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dibanding dengan laki-laki, peran perempuan dalam pembangunan desa belumlah maksimal. Pada masa kepemimpinan Kepala Desa Ahmad (1998-2013), pemerintah desa belum melibatkan perempuan dalam pembuatan keputusan desa.⁵ Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Melati, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan juga merupakan istri dari Kepala Desa Ahmad:

"Kalau mau ini laki-lakinya aja kan yang musyawarah. Kalau ada kegiatan itu biasanya laki-laki yang buat proposal yang memutuskan desa ini kan. Kalau ibu-ibunya enggak." (Melati, Wali Amanah Koperasi "Banjar Harapan", desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 17 Juli 2019)

Perempuan belum dilibatkan dalam pembuatan keputusan desa. Pelibatan perempuan hanya sebatas sebagai penerima program pembangunan, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri). Menurut Ahmad, perempuan diundang ke kantor desa ketika pembagian bantuan pendidikan untuk anak mereka.⁶

Selain tidak dilibatkan dalam keputusan desa, awalnya perempuan-perempuan di desa juga tidak memiliki wadah untuk berkumpul. PKK sebagai organisasi perempuan di level desa juga tidak berjalan sampai saat ini. Kader PKK di level desa hanya mengikuti kegiatan PKK di level kecamatan.

"Simpan pinjam ke kantor camat langsung tapi enggak lama berhenti, ibu-ibunya gak rajin cari usaha kecil-kecilan. Dulu kan ibu-ibu ada anak kecil, repot jadi ikut suami aja ke sawah." (Melati, Wali Amanah Koperasi "Banjar Harapan", desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 17 Juli 2019)

Setelah PEKKA masuk ke desa ini pun, kegiatan PKK di level desa pun masih terbatas pada kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK di Tingkat Kecamatan.⁷ Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan perempuan seperti menjahit dan membuat telur asin memang berguna untuk perempuan, tetapi tidak mampu menjadi wadah bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di desa demi menyalurkan kepentingan perempuan. Selain itu, tidak semua perempuan desa dapat secara aktif mengikuti kegiatan PKK di tingkat kecamatan maupun kegiatan kemasyarakatan yang lain.⁸ Hanya beberapa orang yang aktif mengikuti kegiatan, misalnya Melati dan Hj. Aminah. Melati adalah Ketua PKK di desa ketika itu, sementara Hj. Aminah merupakan anggota kelompok tani.

"Saya ikut kegiatan PKK. Kegiatannya antara lain arisan bulanan, simpan pinjam, pengajian, ikut lomba. Macam-macam, keterampilan buat kue, buat ayaman untuk ikan. Kadang-kadang ada pertemuan bulanan. Yang aktif itu dia yang di kecamatan. Istri kepala desa yang hadir. Kalau yang di desa, kadang-kadang aja kalau ada pertemuan itu diundang, 2-3 orang itu saja, tapi tempatnya di kecamatan. Cuma itu mbak, ketuanya aja yang diundang, terus ibu PKK bilang lagi ke masyarakat." (Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

⁵ Wawancara dengan Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019.

⁶ Wawancara Ahmad, mantan kades dan sekarang menjabat sebagai BPD, desa penelitian di HSU, 18 Juli 2019.

⁷ Wawancara Melati, wali amanah Koperasi "Banjar Harapan", desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

⁸ Wawancara dengan Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019.

3. Membangun Kelompok Kolektif Perempuan sebagai Kendaraan Program PEKKA

3.1. Organisasi PEKKA (Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)

PEKKA merupakan organisasi pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang seringkali mengalami kerentanan dari segi ekonomi maupun sosial. PEKKA memahami perempuan kepala keluarga sebagai perempuan yang berperan dalam mencari nafkah untuk keluarga, mengelola rumah tangga dan menjadi pengambil keputusan. Terdapat beberapa kriteria perempuan kepala keluarga, yaitu perempuan yang bercerai, ditinggal suaminya, suami sudah meninggal, perempuan tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga, perempuan menikah tetapi suaminya tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, serta perempuan menikah tetapi suaminya tidak tinggal di rumah atau berpoligami (PEKKA, 2018a).

PEKKA memiliki alasan mengapa memilih Kabupaten HSU sebagai wilayah dampingan. Menurut Pendamping Lapangan PEKKA area Kalimantan Selatan, berdasarkan data dari pemerintah, HSU memiliki angka perceraian yang tinggi (antaranews.com, 2010).⁹ Salah satu faktor yang mendorong tingginya perceraian yaitu keyakinan agama yang kuat dari masyarakat sehingga banyak pasangan yang menikah tanpa pacaran dan saling mengenal.¹⁰ Akibatnya, setelah menikah banyak di antaranya yang bercerai karena alasan ketidakcocokan. PEKKA membawa program perlindungan sosial di wilayah HSU dengan dua alasan. Pertama, masih banyaknya orang yang tidak memiliki dokumen identitas kependudukan, seperti KTP dan Kartu Keluarga. Kedua, adanya kebutuhan untuk mengakses bantuan untuk perlindungan sosial, misalnya jaminan kesehatan, bantuan perlindungan sosial, dan jaminan sosial.¹¹

PEKKA melakukan beberapa bentuk pendekatan untuk mengatasi permasalahan di desa. Pertama adalah pemetaan demografi penduduk di desa. Hasil pemetaan kemudian digunakan untuk membangun kepercayaan pemerintah dan warga di desa. Selanjutnya, PEKKA membentuk organisasi berbasis keanggotaan, yakni Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) terkait pemberdayaan ekonomi perempuan desa, sebagai kendaraan kegiatan PEKKA. Kelompok Pekka ini juga menjadi kendaraan yang menyediakan kesempatan pengembangan kapasitas bagi perempuan di desa.

Pemetaan demografi

Di Hulu Sungai Utara, Pendamping Lapangan PEKKA mendekati pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk memetakan jumlah kepala keluarga di HSU. Selain itu, PEKKA juga memetakan kecamatan yang memiliki jumlah perempuan kepala keluarga tinggi. Salah satu kecamatan yang jumlah perempuan kepala keluarganya banyak yaitu Kecamatan Sungai Pandan sehingga PEKKA memutuskan untuk mendampingi kepala keluarga perempuan di wilayah ini. PEKKA kemudian mendatangi kecamatan untuk memetakan jumlah perempuan kepala keluarga di level desa.

"Jadi kita menggunakan data statistik juga kenapa memilih di HSU. Awalnya kita izin ke Kesbangpol lalu izin ke Bupati. Kita juga ngobrol dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk tahu daerah mana yang masih banyak jumlah [perempuan] kepala keluarganya. Berdasarkan diskusi dengan dinas, ditunjukkan Kecamatan Sungai Pandan yang masih banyak perempuan kepala keluarganya. Lalu kita turun ke kecamatan, lalu ke desa." (Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019)

Membangun kepercayaan pemerintah dan masyarakat desa

Pada awal kedatangannya di Kecamatan Sungai Pandan, PEKKA menggunakan beberapa strategi untuk mendekati dan membangun kepercayaan pemerintah dan masyarakat desa.¹² Pertama, PEKKA mendatangi rapat-rapat di kecamatan yang melibatkan kepala desa. Sebelumnya, PEKKA telah melakukan pendekatan

⁹Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

¹⁰Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

¹¹Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

¹²Wawancara Ana, mantan pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 28 Agustus 2019.

kepada pemerintah kecamatan sehingga dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan rapat. Melalui forum tersebut, PEKKA memberikan penjelasan tentang program yang akan dilakukan kepada kepala desa yang hadir dan mendapatkan tanggapan yang baik dari Kades. *Kedua*, PEKKA mendatangi pemerintah desa di Kecamatan Sungai Pandan. Ketika itu, Pendamping Lapangan PEKKA (Ana dan Nining) mendatangi desa dalam dua gelombang. Di setiap gelombang, pendamping lapangan mengunjungi enam desa. *Ketiga*, PEKKA mengikuti kegiatan pengajian untuk mendekati masyarakat secara informal. Melalui kegiatan pengajian masyarakat di setiap desa, pendamping lapangan mulai mengenalkan tentang PEKKA kepada peserta pengajian.

3.2. Kelompok perempuan sebagai kegiatan pemberdayaan ekonomi

Keberadaan PEKKA di desa menjadi peluang bagi perempuan-perempuan desa untuk mengembangkan diri di tengah kesulitan ekonomi dan minimnya potensi desa. Dalam desain pengorganisasian PEKKA, pemberdayaan ekonomi menjadi pintu masuk utama untuk memulai pengorganisasian (PEKKA, 2018b). Untuk wilayah miskin seperti desa penelitian ini, pemberdayaan ekonomi menjadi strategi efektif untuk mendorong keaktifan masyarakat dalam berkelompok. Bentuk pemberdayaan ekonomi yang pertama kali dijalankan yaitu membentuk koperasi simpan pinjam sebagai wadah bagi perempuan untuk menabung, meminjam uang untuk modal usaha, berdiskusi maupun mengadakan pelatihan keterampilan. Ada dua kelompok kolektif perempuan yang terbentuk di desa, yaitu Kelompok Papadaan dan Kelompok Setia Kawan. Kelompok Papadaan diperuntukkan untuk perempuan yang menjadi kepala keluarga, sedangkan pembentukan Kelompok Setia Kawan adalah untuk membuka ruang untuk partisipasi perempuan miskin yang masih bersuami, terutama untuk memperluas akses ekonomi mereka. Kedua Kelompok Pekka ini turut memberikan peluang bagi perempuan desa untuk membangun suatu jaringan dukungan, dengan bekerjasama dengan perempuan lainnya di kelompok, atau dengan tokoh-tokoh penting di masyarakat.

Kelompok Papadaan

Sebagai permulaan, PEKKA membantu perempuan desa untuk membentuk kelompok simpan pinjam bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga, baik karena bercerai ataupun karena suaminya telah meninggal dunia. Kelompok ini diberi nama Papadaan yang memiliki makna kekeluargaan dalam bahasa setempat. Kelompok Papadaan beranggotakan sekitar 23 orang, yang masing-masing menyisihkan sebagian uang mereka untuk ditabung. Hj. Aminah ditunjuk sebagai ketua oleh anggota kelompok ini. Selain sebagai Ketua Kelompok Papadaan, Hj. Aminah juga merupakan Ketua Serikat Pekka Hulu Sungai Utara sejak April 2018, Ketua Kelompok Tani, Bendahara Kelompok Perikanan, dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penunjukan Hj. Aminah sebagai Ketua Kelompok Papadaan dan Ketua Serikat Pekka tidak lain karena ia adalah perempuan termuda dan memiliki kemampuan menulis.¹³ Anggota-anggota lain sebagian besar telah berusia lanjut serta tidak memiliki kemampuan untuk menulis. Kemampuan menulis diperlukan oleh pengurus karena mereka harus membuat catatan kegiatan kelompok maupun mencatat buku tabungan kelompok.¹⁴

“Kita kumpul di pertemuan kelompok. Karena kita tidak ada sekretaris dan bendahara, yang dipilih [ketua] itu [saya]. Seharusnya sekretaris yang menulis. Terus lagi bendahara [...] sekarang ini, dia tidak [bisa] menulis. Bendahara tidak mau juga, akhirnya tugasnya sekretaris dan bendahara diserahkan ke aku.” (Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Hj. Aminah memiliki peran yang besar dalam membesarkan kelompok Pekka di desanya. Ia menjadi ketua kelompok perempuan sejak awal kelompok ini terbentuk. Sebagai Ketua Kelompok Pekka, Hj. Aminah mengalami beragam tantangan. Pertama, pada awal mencari anggota kelompok, masih banyak masyarakat yang tidak percaya padanya. Hj. Aminah bersama dengan anggota yang lain berusaha meyakinkan perempuan

¹³ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

¹⁴ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

lain bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dengan bergabung dengan kelompok, misalnya bisa mengikuti kegiatan simpan pinjam maupun pelatihan. Dalam upaya mengajak perempuan untuk bergabung dengan kelompok Pekka, tidak jarang ia mendapatkan cemoohan dari perempuan lain. Selain itu, beliau juga harus mengeluarkan uang pribadi untuk menyediakan makanan setiap pertemuan kelompok. Hal ini karena masih banyak anggota kelompok yang mengharapkan keuntungan material maupun makanan ketika bergabung dengan kegiatan kelompok.

“Yang caci maki, susah mengumpulkan orang-orang, ada kalau kita mau mengasih tahu orang kita mau kumpulan ada makanannya, ada kah uangnya? Dia ke bilang masyarakat. hampir setiap kali pertemuan aku itu menjamu sama istrinya kepala desa.” (Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Kedua, ada ketakutan dan ketidakpercayaan pada diri sendiri saat berhadapan dengan dinas atau aparat pemerintah. Karena sudah terbiasa mengikuti pendamping lapangan bertemu staf dinas, maka ia pun perlahan mulai berani.

“Pada awalnya kita tidak berani. Yang pertama kali itu kita jangankan ke dinas, kita itu mendekati kepala desa aja rasanya deg-degan. Mulai beraninya kita pada awalnya ya berpikir kita kan manusia, orang lain pun manusia.” (Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Ketiga, ada anggota yang menyebut Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan sesuatu yang haram ketika perkumpulan kelompok sedang berlangsung. Atas tuduhan tersebut, Hj. Aminah menjelaskan bagaimana mekanisme kerja koperasi dan keuntungan yang didapatkan lalu dibagikan dalam bentuk SHU.

“Jadi waktu kita di pertemuan kelompok pembagian SHU, ada salah satu anggota aku yang katanya SHU haram katanya. Ya Allah. Semua anggota mendengar bahwa aku ini mengerjakan yang haram. Ya Allah, gimana ini ke orang ini untuk mendamaikan” (Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Kelompok Setia Kawan

Perempuan-perempuan yang tidak bergabung ke dalam kelompok Papadaan merasa tertarik untuk ikut menabung, mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU), dan mendapatkan pinjaman uang untuk modal usaha.¹⁵ Namun, mereka menghadapi kendala tidak masuk kategori sebagai perempuan kepala keluarga. Untuk merangkul perempuan yang berusia muda, Seknas PEKKA membuat status keanggotaan baru, yaitu Pekka “luar biasa”. Hal ini ditegaskan oleh Hj. Aminah:

“Kelompok baru itu muda-muda, suaminya ada. Baru datang lagi peraturan bahwa di situ ada Pekka luar biasa. Pekka luar biasa itu suaminya ada tapi istrinya membantu bekerja. Nah di situ pada akhirnya ada kelompok baru.” (Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Perempuan-perempuan muda ini kemudian membentuk kelompok yang diberi nama “Setia Kawan”. Kelompok Setia Kawan diketuai oleh Farah, warga desa seberang yang menetap di desa setelah menikah dengan warga lokal. Hingga sekarang, kelompok Pekka Setia Kawan sudah beranggotakan 32 orang. Farah juga aktif mengajak perempuan desa untuk bergabung menjadi anggota Pekka, terutama agar bisa melakukan kegiatan simpan pinjam.

“Saya bilang kita enak, kalau kita sudah aktif kita nabung tiap bulan, kita kalau kekurangan uang mau membuat potong padi, bisa kita pinjam, terus kalau ada keperluan penting banget, bisa pinjam. Kalau kita gak minjam, nanti uangnya bisa kita buat untuk membantu teman. Kalau kita ga pinjam uang, dikelompok, kita membantu teman

¹⁵ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, HSU, 15 Juli 2019.

untuk mendapat pahala. Dia langsung tertarik.” (Farah, Ketua Kelompok PEKKA Setia Kawan, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

Relevansi kegiatan simpan pinjam bagi perempuan

Ada dua konteks utama yang melatarbelakangi kegiatan simpan pinjam relevan dijalankan di desa ini. *Pertama*, masyarakat desa memiliki keterbatasan modal untuk memulai usahanya. Dengan adanya kegiatan simpan pinjam, maka perempuan dapat meminjam uang untuk modal usaha mereka. Anggota Pekka cenderung memanfaatkan koperasi simpan pinjam untuk meminjam modal usaha tani, perikanan, itik, dll. Bunga pinjaman untuk nominal pinjaman sebesar Rp250 ribu-Rp5 juta adalah 1%. Anggota bisa meminjam sebesar Rp250 ribu jika tabungan sudah mencapai Rp50 ribu, dan pinjaman maksimal Rp5 juta jika tabungan sudah mencapai Rp800 ribu.¹⁶

Seorang anggota kelompok yang aktif dalam koperasi simpan pinjam adalah Hj. Rina. Perempuan yang kini berusia 73 tahun telah beberapa kali meminjam uang kepada kelompok sebagai modal untuk beternak itik Alabio (*Anas platyrhynchos borneo*). Itik yang dikenal sebagai itik rawa ini merupakan hewan endemik di wilayah Alabio. Dari hasil beternak itik, Hj. Rina menjual telurnya ke Pasar Alabio dengan menggunakan perahu.

“Dulu awalnya pinjam Rp250 ribu, terus Rp500 ribu, lalu Rp1 juta, pokoknya saya pinjam sampai Rp5 juta untuk modal ternak itik. Mengembalikannya dengan jual telur di pasar Alabio tiap hari Rabu dengan naik kapal.” (Hj. Rina, Anggota Kelompok Papadaan, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 16 Juli 2019)

Kedua, mahalnnya harga bahan baku di pasaran menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Walaupun mereka bisa mendapatkan pinjaman dari koperasi, harga bahan baku yang tinggi membuat hasil keuntungan yang didapat menjadi kecil. Akibatnya, beberapa perempuan merasa bahwa usahanya mengolah makanan kurang bisa berkembang. Beberapa anggota kelompok Pekka menceritakan usaha yang mereka rintis menghadapi hambatan karena sulit dan mahalnnya bahan baku.¹⁷

“Ini jualan jamu pernah, jamu jahe. Itu bahannya mahal, cari akar alang-alangnya susah. Dulu kami juga jualan telur asin, tapi sekarang enggak lagi karena telurnya mahal. Dulu untungnya lima ratus rupiah satu biji telur, sekarang palingan seratus rupiah. Semua rata-rata masalahnya karena bahannya mahal.” (Rami, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 12 Juli 2019)

3.3. Pengembangan kapasitas perempuan

Pembentukan kelompok simpan pinjam perempuan di desa menjadi kendaraan bagi pengembangan kapasitas perempuan yang difasilitasi oleh PEKKA. *Pertama*, pertemuan rutin kelompok mendorong perempuan untuk belajar berbicara di depan umum. Sebelum PEKKA masuk ke desa, banyak perempuan merasa takut dan tidak percaya diri untuk berbicara di dalam forum khususnya jika harus bicara dalam bahasa Indonesia.¹⁸ Ketika pertemuan kelompok, setiap orang mendapat giliran menjadi pembawa acara sehingga setiap anggota dapat berlatih berbicara di depan umum.

“Percaya diri itu mungkin 2 tahun 3 tahun lah, terus sering diundang itu di Telaga Silaba [Amuntai Selatan]. Bersama-sama belajar ke depan, maju satu-satu. Belajar ngomong, kalau memimpin acara satu-satu kalau minggu ini, kamu harus memimpin acara, Ibu Hj. Aminah itu ga bisa sama sekali dulunya.” (Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

¹⁶ Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

¹⁷ Berdasarkan FGD pada 12 Juli 2019, Bu Rami menceritakan usaha pembuatan telur asinnya yang tidak mampu bertahan lama karena persoalan harga telur bebek yang tinggi tidak sebanding dengan harga jualnya. Sementara anggota perempuan lain mengalami kesulitan untuk membeli harga singkong yang cukup mahal sebagai bahan baku pembuatan kerupuk. Gita juga pernah berjualan jamu setelah mendapatkan pelatihan dari PEKKA. Namun, usahanya tidak berjalan lama karena mahalnnya bahan baku pembuatan jamu terbatas.

¹⁸ Wawancara dengan Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019.

Kedua, pelatihan untuk melatih keterampilan perempuan, misalnya pelatihan membuat jamu, telur asin, kue, dll. Dengan latar belakang pendidikan yang sebagian besar hanya sampai tingkat sekolah dasar, mereka tidak memiliki kesempatan pekerjaan yang lebih luas. Melalui pelatihan keterampilan, PEKKA bermaksud menambah kapasitas perempuan sehingga bisa mandiri dan mampu menjalankan usaha.¹⁹ Setelah mendapatkan pelatihan, beberapa anggota kelompok Pekka mencoba menjalankan usaha kecil-kecilan. Ada anggota kelompok Pekka yang mencoba membuat kue-kue lalu menjualnya setiap pagi keliling desa hingga saat ini.²⁰

Ketiga, partisipasi anggota di dalam Akademi Paradigta yang merupakan program pendidikan untuk kader, dan bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di level akar rumput sehingga dapat membangun kehidupan yang sejahtera, adil, demokratis, inklusif dan berdaulat (PEKKA, 2018c). Di level nasional, Akademi Paradigta ditujukan untuk kader desa dan kader Pekka. Namun untuk wilayah Hulu Sungai Utara, Akademi Paradigta hanya ditujukan untuk kader Pekka.²¹ Pelatihan ini ditujukan bagi kader-kader aktif di level kabupaten. Pemilihan peserta didasarkan pada keaktifan kader di kelompok dan keinginan untuk belajar.²² Setelah pelatihan, kader diharapkan kembali ke desa dan membagi ilmu yang telah didapatkan di pelatihan.

Pada tahun 2017, Akademi Paradigta diselenggarakan di desa selama 3 bulan. Sekolah kader ini mengajarkan pengetahuan umum mengenai tata kelola pemerintahan di desa dan cara-cara advokasi kebijakan kebutuhan perempuan. Peserta diajarkan mengenai APBDDes, Dana Desa, Musyawarah Desa (Musdes), dan melakukan praktik advokasi dengan *role play*.²³ Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan anggota kelompok Pekka dari berbagai desa. Dari desa ini, ada 10 orang anggota kelompok yang mewakili, di antaranya yaitu Hj. Aminah, Farah, Hj. Rina, Romo, Ambar, Junaedah, Melati, Ijah, Nini, dan Diah. Dari 10 orang tersebut, dua orang tidak diwisuda karena seringkali tidak hadir dalam pelatihan, yaitu Junaedah dan Nini. Hj. Rina menyampaikan bahwa dengan mengikuti Akademi Paradigta, dirinya belajar tentang gender, sopan santun, cara berbusana ketika mengikuti rapat atau ke kantor dinas, dan berlatih berbicara.²⁴

Dari program-program PEKKA di atas, perempuan di desa mendapatkan pengetahuan baru, peningkatan kemampuan, serta belajar untuk berani dan percaya diri ketika berinteraksi dengan pemerintah maupun berbicara dalam forum. Menurut beberapa perempuan, awalnya mereka tidak berani berbicara ketika ikut dalam rapat desa. Mereka merasa malu ketika harus berinteraksi dengan pejabat pemerintah dan mengikuti musyawarah. Setelah mengikuti pembelajaran di PEKKA, mereka mulai berani untuk berbicara dalam forum dan percaya diri ketika bertemu dengan dinas pemerintah maupun bupati.²⁵

Perempuan di desa mulai aktif terlibat dalam musyawarah desa sejak adanya PEKKA. Keaktifan mereka bukan hanya didukung oleh keberanian mereka, tetapi juga sudah dapat memahami kebutuhan mereka sebagai perempuan. Ketika perempuan sudah memahami kebutuhannya, maka mereka mengerti apa saja yang hendak diusulkan dalam musyawarah desa ketika membahas perencanaan pembangunan desa.

Selain di level desa, perempuan juga mulai aktif mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di level kecamatan hingga kabupaten. Untuk keterlibatan perempuan, pendamping desa

¹⁹ Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, 1 desa penelitian di HSU, 1 Juli 2019.

²⁰ Berdasarkan diskusi dalam FG, desa penelitian di HSU, 12 Juli 2019.

²¹ Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

²² Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

²³ Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

²⁴ Wawancara Hj. Rina, Anggota Kelompok Papadaan, desa penelitian di HSU, 16 Juli 2019.

²⁵ Wawancara Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019; Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019; Wawancara Hj. Rina, Anggota Kelompok Papadaan, desa penelitian di HSU, 16 Juli 2019.

mengarahkan agar Musdes dihadiri oleh perwakilan perempuan sesuai dengan UU Desa No. 6 tahun 2014.²⁶ Biasanya perempuan mengikuti Musrenbang Kecamatan sebagai perwakilan dari kader Posyandu desa. Di level kabupaten, BAPPEDA juga pernah mengundang ibu-ibu PEKKA untuk hadir dalam Musrenbang kabupaten. Beberapa perempuan yang biasa ikut Musrenbang desa yaitu Hj. Aminah, Melati, Hj. Rina, Farah, dan Ambar. Ambar sering mengikuti Musdes mewakili Posyandu Lansia dan juga mengikuti Musrenbang desa hingga kecamatan.

Keterlibatan perempuan dalam Musdes hanya diwakilkan oleh perempuan-perempuan yang cukup aktif di kelompok Pekka maupun di desa, misalnya Hj. Aminah, Farah Hidayah, dan Farah. Meskipun mulai mengikuti musyawarah desa, sebagian anggota PEKKA di desa masih menghadapi hambatan dalam berbicara untuk menyampaikan usulan dengan alasan malu. Ambar, Sekretaris Kelompok Setia Kawan dan pernah menjadi Ketua PKK masih mengalami hal tersebut.²⁷ Saat Musdes ia tidak berani berbicara karena malu mengutarakan pendapat.²⁸ Jika memiliki usulan, Ambar menyampaikan idenya kepada Hj. Aminah atau Farah.

“Di rapat malu-malu sedikit dan diam aja. Jika ada usulan menyampaikan lewat teman. Di rapat kecamatan sebagai kader Posyandu juga tidak ngomong karena malu.” (Ambar, Sekretaris Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Beberapa perempuan yang berani memberikan usulan yaitu Hj. Aminah dan Farah. Jika diibaratkan, mereka adalah corong bagi usulan-usulan perempuan desa yang tidak berani berbicara. Hj. Aminah mengaku lebih aktif sejak keterlibatannya di Kelompok Pekka, sedangkan Farah aktif sejak posisi Kepala Desa dijabat oleh Saiful.²⁹ Berdasarkan FGD pada 12 Juli 2019, anggota Pekka mengaku usulan perempuan-perempuan seringkali disampaikan lewat kader Pekka untuk diteruskan dalam pertemuan Musdes.

Namun, ada juga perempuan yang tidak mengikuti Musdes karena memiliki keterbatasan finansial untuk berpartisipasi. Misalnya Yati, ibu muda yang suaminya bekerja sebagai pencari ikan, menceritakan bahwa dirinya tidak aktif di kelompok perempuan dan tidak pernah mengikuti Musdes. Ia tidak memiliki uang lebih untuk mengikuti kegiatan simpan pinjam di kelompok perempuan sehingga memilih untuk tidak bergabung.³⁰

Upaya PEKKA untuk mendorong perempuan berpartisipasi aktif juga dilakukan dengan menempatkan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2017 yang menyatakan minimal satu orang keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD. Pada pemilihan anggota BPD tahun 2017, Nini yang merupakan anggota kelompok Setia Kawan terpilih menjadi anggota BPD perwakilan perempuan. Dalam pemilihan BPD saat itu, beberapa perempuan turut berkompetisi bersama laki-laki. Di antaranya yaitu Imah, anggota kelompok Setia Kawan yang mewakili RT 4 dan Lili mewakili RT 2. Lili berani maju mencalonkan diri setelah mendapat dorongan dari Hj. Aminah.³¹ Kelompok Pekka sangat mendukung perempuan yang bersedia mencalonkan diri dalam pemilihan anggota BPD. Hj. Aminah sendiri memiliki keinginan untuk mencalonkan diri namun terhambat oleh pendidikannya yang hanya lulus SMP.

Upaya keterlibatan perempuan dalam Musdes bukan tanpa halangan. Pada awalnya, peran perempuan tidak dianggap penting sehingga mereka tidak mendapatkan undangan untuk datang ke Musdes.³² Mereka mulai

²⁶ Wawancara Maya, Pendamping Pemberdayaan Desa, desa penelitian di HSU, 17 Juli 2019.

²⁷ Wawancara Ambar, Sekretaris Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

²⁸ Wawancara Ambar, Sekretaris Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

²⁹ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019; Wawancara Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019.

³⁰ Wawancara Intan, salah satu perempuan desa non anggota Pekka, desa penelitian di HSU, 16 Juli 2019.

³¹ Wawancara dengan Lili, mantan calon BPD, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019.

³² Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

berani menghadiri Musdes tanpa diundang.³³ Hj. Aminah menjelaskan bahwa pada awalnya ia mengetahui informasi penyelenggaraan Musdes tanpa sengaja.³⁴ Ketika ada tetangganya lewat depan rumah ke arah kantor desa, dia mendapatkan informasi bahwa akan ada Musdes. Dengan segera ia mengajak ibu-ibu lain untuk datang ke kantor desa, walaupun tanpa undangan.³⁵ Pada saat itu, kepala desa menerima kedatangan ibu-ibu, namun tidak demikian dengan beberapa orang peserta rapat yang lain. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Hj. Aminah:

“Nggak, perempuan tidak aktif, tidak dilibatkan. Malah kita diusir; ih ngapain perempuan di sini, pulang aja. Nah begitu.” (Hj. Aminah, Ketua PEKKA tingkat Kabupaten, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Keberanian mereka datang ke Musdes tanpa diundang karena kesadaran mereka bahwa perempuan memiliki hak untuk bersuara dalam perencanaan pembangunan desa. Munculnya keberanian ini tidak lepas dari peran Pendamping Lapangan PEKKA Kalsel yang memang mendorong perempuan menghadiri Musdes tanpa peduli ada undangan atau tidak.³⁶ Menurut Hj. Rina, pemerintah desa terbuka menerima kedatangan perempuan. Namun, masih ada warga desa yang meremehkan perempuan dan menyebutkan kenapa perempuan berpartisipasi dalam Musdes. Hal serupa disampaikan oleh Hj. Aminah bahwa ada beberapa orang yang menganggap kelompok Pekka tidak penting untuk mengikuti Musdes.³⁷ Hambatan seperti ini tidak hanya dialami oleh kader Pekka di desa, tetapi juga oleh kader Pekka di wilayah Hulu Sungai Utara.

Tidak semua usulan perempuan diterima dalam Musdes. Ada usulan perempuan yang ditolak dalam Musdes. *Pertama*, anggota Kelompok Pekka juga mengusulkan untuk peningkatan kesetaraan perempuan, termasuk dalam rumah tangga antara suami istri. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Hj. Rina, perempuan yang selama belasan tahun mengalami poligami. Sebagai korban poligami, dan dengan pengetahuan yang didapatkannya melalui Akademi Paradigma, Hj. Rina mencoba menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya perempuan mempunyai posisi tawar yang setara dengan laki-laki.

“Ya tentang ditingkatkan kesetaraan perempuan, babinian [perempuan] harus setara. Sama-sama, ya agar tidak diremehkan, babinian [perempuan] kan sering diremehkan.” (Hj. Rina, Anggota Kelompok Papadaan, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 16 Juli 2019)

Dengan posisi tawar yang setara, perempuan tidak lagi diremehkan, karena selama ini perempuan sering mengalaminya dalam rumah tangga.³⁸ Namun, pemerintah desa belum mengakomodasi usulan Hj. Rina terkait program kesetaraan gender. *Kedua*, beberapa kali Hj. Aminah, Farah, dan Melati bersuara dalam Musdes untuk mengusulkan mesin parut kelapa dan mesin giling padi.³⁹ Namun, usulan ini belum direalisasikan oleh pemerintah desa. *Ketiga*, usulan untuk membangun pusat kegiatan Kelompok Pekka dan pengadaan alat untuk Kelompok Pekka (komputer dll). Usulan ini ditolak karena prioritas desa masih terfokus pada pembangunan jalan serta bangunan berupa lumbung padi dan lantai jemur. Usul lain yang ditolak adalah pengadaan peralatan (laptop, meja, dll) untuk Center Pekka (Pusat Belajar Pekka/Pekka Community Learning Center). Kelompok Pekka sendiri sudah membeli tanah untuk pusat kegiatan Pekka di desa. Usul ini ditolak karena BPD menganggap pusat kegiatan Pekka adalah urusan organisasi Pekka dan bukan pemerintah desa.

³³ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019; Wawancara Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019.

³⁴ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

³⁵ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019; ; Wawancara Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019.

³⁶ Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

³⁷ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

³⁸ Wawancara Hj. Rina, Anggota Kelompok Papadaan, desa penelitian di HSU, 16 Juli 2019.

³⁹ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

Selain aktif melakukan kegiatan simpan pinjam dan pelatihan, kelompok Pekka juga berupaya merintis majelis taklim khusus untuk perempuan bernama “Ar Raudah”. Inisiasi ini datang dari Nini, guru TPA sekaligus anggota Kelompok Setia Kawan. Gagasan tersebut kemudian disambut baik oleh Hj. Aminah, yang dengan senang hati mewaqafkan rumah peninggalan orang tuanya sebagai tempat Majelis Taklim. Kegiatan Majelis Taklim juga diikuti oleh ibu-ibu di sekitar desa. Selain sebagai ruang keagamaan, Majelis taklim juga menjadi ruang bagi anggota kelompok untuk bertemu dan membicarakan agenda Pekka setelah kegiatan yasinan selesai.

Kemajuan Kelompok Pekka tidak hanya ditentukan oleh kerja kolektif mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh peran kepala desa yang sering disebut sebagai *pambakal*. Sejak tahun 2014, desa penelitian ini dipimpin oleh Saiful, anak dari Kepala Desa pertama di desa ini. Saiful adalah sosok kepala desa yang akomodatif, termasuk dalam mendukung program-program kelompok Pekka.⁴⁰ Saiful memiliki kedekatan dengan anggota kelompok Pekka sehingga dia menjadi kepala desa yang populer di kalangan perempuan desa.

Ada beberapa bentuk dukungan dari kepala desa untuk kelompok Pekka. *Pertama*, kepala desa memberikan izin kepada kelompok Pekka menggunakan kantor desa untuk pertemuan kelompok Pekka maupun untuk kegiatan perempuan yang lain, seperti pelatihan, Posyandu Lansia, Posyandu anak, dll.⁴¹ *Kedua*, kepala desa membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat desa. Pada masa Kades Ahmad, perempuan tidak dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa.⁴² *Ketiga*, kepala desa selalu memperhatikan aspirasi perempuan dan berusaha memenuhi kebutuhan yang diusulkan oleh perempuan. Misalnya, kepala desa mendukung usulan perempuan untuk pengadaan alat kesehatan untuk Posyandu. *Keempat*, kepala desa mengeluarkan uang pribadi untuk kegiatan Pekka. Jika kelompok tidak memiliki anggaran untuk konsumsi, maka kepala desa memberikan uang untuk membeli makanan. Selain itu, kepala desa juga bersedia mengantarkan anggota kelompok Pekka untuk mengikuti pelatihan maupun lomba di level kecamatan maupun kabupaten.⁴³

4. Penguatan Kapasitas Ekonomi dan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pembangunan Desa

Menguatnya gerakan kolektif perempuan yang didukung oleh PEKKA membawa perubahan penting bagi perempuan. Secara garis besar, ada dua perubahan yang terjadi di desa ini. *Pertama*, inisiasi pendirian BUMDes sebagai upaya penguatan kapasitas ekonomi perempuan. Keberadaan BUMDes dapat menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi desa dan ekonomi perempuan. *Kedua*, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui upaya mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat desa, akses terhadap anggaran desa dan keterwakilan politik perempuan dalam musyawarah desa melalui adanya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelibatan Perwakilan Organisasi Perempuan Dalam Musrenbangdes Kecamatan Sungai Pandan yang memformalisasi partisipasi organisasi perempuan di desa dan kecamatan. SK yang diinisiasi oleh PEKKA ini bertujuan untuk memastikan perempuan dilibatkan dalam musyawarah desa serta usulan perempuan dapat diakomodasi oleh pemerintah desa maupun kecamatan.

4.1. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perempuan Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya dilakukan melalui koperasi simpan pinjam dan pelatihan-pelatihan sebagaimana program Yayasan PEKKA. Untuk mendorong perekonomian dan kemandirian desa, perempuan yang bergabung dalam kelompok Pekka berinisiatif mendorong pemerintah desa untuk

⁴⁰ Wawancara Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, 13 Juli 2019; Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

⁴¹ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

⁴² Wawancara Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019.

⁴³ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019; Wawancara Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019; Wawancara Melati, Wali Amanah Koperasi “Banjar Harapan”, desa penelitian di HSU, 17 Juli 2019.

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya BUMDes, perempuan-perempuan berharap mereka bisa mendapatkan modal untuk menjalankan usaha. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes), desa penelitian termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal dengan Indeks Desa Membangun 0.48 (Kemendes, 2019). Sebagai desa sangat tertinggal, perputaran uang di desa penelitian ini berjalan lambat dan modal menjadi hambatan utama bagi pengembangan ekonomi lokal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ambar, anggota kelompok Setia Kawan. Menurutnya, kebutuhan utama perempuan di desa yaitu terkait kebutuhan modal usaha. Dengan aktif di BUMDes, ia berharap bisa mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya dalam bidang perikanan.⁴⁴

Dalam konteks nasional, pendirian BUMDes menjadi salah satu usaha untuk mengembangkan perekonomian desa. UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 43 Tahun 2014, telah mengatur keberadaan BUMDes sebagai usaha desa yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan regulasi ini, pemerintah pusat mendorong desa-desa untuk membentuk BUMDes. Semangat pembentukan BUMDes menjangkau ke desa-desa yang ingin keluar dari kemiskinan, termasuk desa yang menjadi lokasi studi kasus.

Gagasan pembentukan BUMDes di desa berawal dari undangan untuk mengikuti pelatihan BUMDes di Jakarta. Saat itu, Hj. Aminah berangkat bersama dengan Nur (anggota Pekka di desa lain). Dari pelatihan ini, Hj. Aminah mendapatkan pengetahuan terkait dengan BUMDes. Sepulang dari Jakarta, ia menyampaikan hasil pelatihan kepada anggota Pekka dan pemerintah desa. Kelompok Pekka selalu berkoordinasi dengan kepala desa baik sebelum datang ke acara pelatihan maupun setelah pelatihan selesai. Komunikasi yang terbangun dengan baik antara kelompok Pekka dan pemerintah desa menandakan bahwa pemerintah desa memberikan dukungan pada kelompok, termasuk dalam pembentukan BUMDes.

Bentuk dukungan lain dari pemerintah desa yaitu dengan mengajak kelompok Pekka mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten. Ketika itu, kepala desa mengajak Hj. Aminah untuk mengikuti pelatihan bersama dengannya. Setelah selesai mengikuti pelatihan selama 2 hari, mereka merencanakan untuk membentuk BUMDes. Sebagai langkah awal pemerintah desa membentuk pengurus BUMDes yang terdiri dari penasehat, pengawas dan pelaksana operasional. Berdasarkan Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 5 tahun 2017, yang bertindak sebagai Penasehat BUMDes adalah kepala desa, sedangkan Pengawas BUMDes terdiri dari unsur BPD dan tokoh masyarakat.

Struktur pelaksana operasional BUMDes di desa penelitian terdiri dari beberapa bagian, yaitu Ketua BUMDes dijabat oleh Hj. Aminah, Sekretaris BUMDes dipegang oleh Farah, posisi bendahara dijabat oleh Nini dan kepala unit usaha dijabat oleh Ambar, Hj. Rina, dan Farah. Mail yang merupakan anggota BPD menjabat sebagai Ketua Pengawas BUMDes dan Udin yang juga anggota BPD menjadi wakil ketua pengawas. Tokoh masyarakat yang dipilih sebagai sekretaris dan anggota pengawas yaitu Adan dan Ulim. Di luar kepengurusan inti, sebagian besar anggota Pekka ikut terlibat dalam pembentukan BUMDes.

Setelah struktur pengurus BUMDes terbentuk, Pengurus PEKKA mendorong pemerintah desa untuk mengeluarkan Perdes terkait BUMDes. Penyusunan draft Perdes melibatkan Hj. Aminah sebagai ketua Kelompok Papadaan sekaligus Ketua BUMDes, aparat pemerintah desa yang berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Proses penyusunan draf Perdes dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes juga melibatkan peran dari kepala desa sebagai penasehat. Ia membantu berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun kabupaten. Di dalam Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No 5 tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, dinyatakan bawa penasehat

⁴⁴ Wawancara Ambar, Sekretaris Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

BUMDes memiliki dua tugas utama yaitu *pertama*, melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. *Kedua*, Penasihat mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Penyusunan Perdes BUMDes dilakukan melalui rapat desa yang melibatkan pengurus BUMDes, aparat desa, BPD, perwakilan RT dan anggota Pekka pada tanggal 14 Desember 2015. Proses penyusunan Perdes tersebut tidak menemui hambatan besar. Dukungan penuh kepala desa terhadap BUMDes menjadikan agenda kelompok Pekka menjadi lancar. Terlebih, pembentukan BUMDes juga menjadi salah satu agenda pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam rangka mendorong penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan. Di dalam Perda No. 5 Tahun 2017, pemerintah kabupaten menetapkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Ada beberapa usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang diperbolehkan dalam BUMDes di antaranya yaitu, pelayanan jasa (simpan pinjam, pengelolaan air maupun listrik, angkutan, perkreditan), penyaluran sembilan bahan pokok, sarana perdagangan dan hasil pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat, dan kegiatan perekonomian lain sesuai dengan kebutuhan desa.

Menurut Daus, Staf DPMD Kabupaten Hulu Sungai Utara (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), BUMDes dapat menjadikan desa menjadi mandiri. Hal ini disebabkan desa tidak bisa mengandalkan Dana Desa secara terus menerus, sebab bukan tidak mungkin jika suatu saat Dana Desa akan dicabut.

“Dengan adanya Dana Desa ini, salah satu dalam prioritas Dana Desa itu adalah mendirikan BUMDes. Dengan adanya BUMDes, itu diharapkan desa mempunyai pendapatan asli. Seharusnya kita-kita ini dari BPMD, mengharapkan dengan adanya BUMDes, desa itu bisa lebih mandiri. Kan kita takutnya tadi, apa. Ke depannya Dana Desa kan tidak ada.” (Daus, Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, desa penelitian di Hulu Sungai Utara 8 Juli 2019)

Pemerintah di tingkat kecamatan juga secara aktif mendorong untuk pembentukan BUMDes di setiap desa sebagai upaya penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berkelanjutan. Sejak Dana Desa bergulir pada tahun 2015, sebesar 75% digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memang menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara, maupun untuk desa. Sebagai daerah yang 80% terdiri dari rawa, infrastruktur dibutuhkan untuk mempermudah akses antar wilayah dan sebagai sarana untuk membangun perekonomian daerah. Untuk membangun jalan yang kokoh, pemerintah harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit.

“Dana Desa sangat-sangat membantu. Bahkan peningkatannya 5 tahun sampai saat ini, dari 5 tahun ke belakang jauh beda. Pertama, infrastruktur yang dulunya sangat minim sekarang sudah mendingan. Bahkan sampai mengurangi biaya produksi kan kita untuk daerah ini mungkin daerah peternakan, pertanian, dan perikanan kan hasil usahanya rata-rata. Nah sangat banyak mengurangi biaya produksi itu, bahkan biaya pengangkutan bahan, sangat jauh benar bedanya dengan yang dulu.” (Daus, Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 8 Juli 2019)

Setelah selama 4 tahun Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten mendorong penggunaan Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu BUMDes. Berdasarkan arahan dari pemerintah Kabupaten, pemerintah Kecamatan Sungai Pandan ikut berusaha mendorong pengembangan BUMDes di tingkat desa.

Berdasarkan Perdes No. 04 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera”, BUMDes memiliki beberapa jenis usaha. *Pertama*, bisnis sosial (*social business*) untuk melayani masyarakat sekaligus mendapatkan keuntungan. Yang termasuk dalam bisnis sosial yaitu air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan teknologi tepat guna. *Kedua*, bisnis penyewaan barang seperti alat transportasi, perkakas

pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes. *Ketiga*, usaha perantara (*brokering*) seperti jasa pembayaran listrik, pasar desa dll. Keempat, bisnis berproduksi atau berdagang, misalnya yaitu hasil pertanian. Kelima, bisnis keuangan yang dapat menyediakan akses kredit dan peminjaman untuk masyarakat. Keenam yaitu usaha bersama (Pemerintah Desa, 2015b, 6).

Secara khusus, beberapa potensi yang ada di desa yaitu budidaya ikan air tawar, peternakan itik dan keterampilan tata boga/memasak. Menurut sekretaris desa, perikanan dan peternakan merupakan usaha potensial bagi desa.⁴⁵ Posisi geografis desa yang berada di tepi sungai merupakan potensi bagi desa untuk mengembangkan usaha perikanan dengan menggunakan keramba. Selain itu, desa juga memiliki potensi peternakan, khususnya itik Alabio. Beberapa warga, termasuk anggota Pekka, telah merintis peternakan itik Alabio.

Sejak terbentuk pada tahun 2015, BUMDes “Sejahtera” belum memulai usahanya. Pada tahun 2017, Saiful menjanjikan akan menganggarkan Rp300 juta untuk pengembangan BUMDES.⁴⁶ Namun, pemerintah desa sampai saat ini belum menganggarkan dana untuk BUMDes karena pemerintah masih fokus pada pembangunan infrastruktur desa.⁴⁷ Beberapa infrastruktur yang mendesak untuk dibangun terkait dengan kebutuhan pertanian, di antaranya yaitu Jalan Usaha Tani (JUT), lumbung desa, dan lantai jemur.

Pembangunan JUT merupakan kebutuhan penting untuk desa. Jalan ini menghubungkan wilayah pertanian warga dengan wilayah permukiman. Sebelum terdapat JUT, petani merasa kesulitan ketika menuju sawah karena kondisi jalan yang tergenang. Oleh karena itu, pemerintah desa memprioritaskan JUT sebagai program pembangunan. Pemerintah membangun satu JUT untuk masing-masing RT sehingga memudahkan warga untuk menjangkau lahan garapannya. Untuk membangun JUT, pemerintah desa mengeluarkan dana cukup besar karena kebutuhan material yang lebih mahal untuk membangun infrastruktur di area rawa. Pada tahun 2019, pemerintah desa menganggarkan Rp151.046.700,00 dalam ABPDES untuk pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, atau pengerasan Jalan Usaha Tani.

Sedangkan kebutuhan membangun lantai jemur tidak lain untuk mempermudah petani untuk menjemur padi pasca panen. Tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan bagi petani di daerah rawa, termasuk untuk mengeringkan padi. Keterbatasan lahan kering menyebabkan petani kesulitan menjemur padinya. Pasca panen, petani juga membutuhkan tempat untuk menyimpan padi sehingga pemerintah desa juga menganggarkan untuk membuat lumbung padi. Akan tetapi sampai saat ini lumbung desa belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyimpan hasil pertanian. Lumbung desa justru digunakan sebagai gedung sarana olahraga, walaupun pembangunan dindingnya belum selesai dilakukan. Penggunaan lumbung desa untuk sarana olahraga oleh para pemuda mendapatkan dukungan dari pemerintah desa. Hal ini ditunjukkan dengan kemauan pemerintah desa memberikan lampu dan alat-alat olahraga seperti meja tenis dan net bulu tangkis.

Selain terkendala oleh anggaran, tantangan lain dari pendirian BUMDes yaitu adanya anggota BPD yang tidak setuju dengan BUMDes. Hal ini sebagaimana penuturan Dayat, Kasi Pemerintahan Desa:

“Pokoknya ada lah, BPD ni, ga suka BPDnya ini, pokoknya ga suka PEKKA. Mungkin sentimennya ga tau apalah itu PEKKA, sama kaya BUMDes kemarin kan itu kan PEKKA yang membuat BUMDes kemarin.” (Dayat, Kasi Pemerintahan Desa, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 16 Juli 2019)

⁴⁵ Wawancara Bara, Sekretaris Desa, desa penelitian di HSU, 14 Juli 2019

⁴⁶ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019

⁴⁷ Wawancara Dayat, Kasi Pemerintahan Desa, desa penelitian di HSU, 16 Juli 2019

Namun, ketidaksetujuan ini tidak menjadi hambatan besar bagi pengurus BUMDes. Sebab, orang yang menolak BUMDes tidak menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka. Penolakan mereka tidak menjadi gerakan yang menghambat BUMDes.

Pendirian Kelompok Perikanan

Untuk mulai menghidupkan usaha perikanan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membentuk kelompok perikanan yang didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Perikanan. Ide pembentukan kelompok perikanan berawal dari Melati, wali amanah koperasi Pekka “Banjar Harapan”. Dia mendapatkan inspirasi dari pengusaha ikan di desa sebelah, sehingga kemudian ia mencari informasi bagaimana cara memelihara ikan dan tempat menjual keramba bekas.⁴⁸

Melati memiliki ketertarikan untuk memelihara ikan sebagai sumber penghasilan tambahan selain bertani. Karena ketertarikannya pada sektor perikanan, Melati diajak mengikuti pelatihan di desa sebelah oleh PPL Dinas Perikanan. Dia didorong untuk membentuk kelompok perikanan di Desa. Ketika itu, ia mengajak warga desa yang tertarik dan berhasil mengajak 10 orang untuk bergabung dalam kelompok. Namun, dalam pelatihan di tersebut, hanya ada 5 orang yang dapat hadir.

Pada awal pembentukan kelompok, setiap anggota harus memberikan simpanan pokok sebesar Rp300.000,00 per orang yang bisa dibayar secara tunai maupun dicicil. Simpanan pokok ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kelompok. Selain simpanan pokok, anggota juga harus membayar iuran wajib sebesar Rp5.000,00/orang. Kelompok perikanan ini dilatih PPL Dinas Perikanan untuk membuat pembukuan dan membuat proposal. Kelompok ini berupaya membuat proposal pengajuan dana kepada pemerintah, hingga saat ini belum ada bantuan yang turun. Selain Melati, ada perempuan lain yang memulai usaha perikanan yaitu Ambar. Mereka membuat keramba, menyediakan bibit ikan dan umpan dengan modal sendiri. Baik Melati maupun Ambar meminjam uang kepada kelompok simpan pinjam Pekka sebagai tambahan modal.⁴⁹ Jika nanti bantuan dari pemerintah untuk usaha kelompok sudah diterima, maka dana tersebut digunakan untuk membeli modal lalu keuntungannya dibagi untuk anggota kelompok.

Untuk rencana ke depan, pengurus BUMDes berencana mengintegrasikan kegiatan BUMDes dengan kegiatan kelompok perikanan “Usaha Bersama”. Integrasi menjadi langkah yang sangat memungkinkan karena BUMDes dan kelompok perikanan tidak saling berkompetisi. Beberapa pengurus BUMDes juga menjadi anggota kelompok perikanan. Antara organisasi BUMDes, kelompok perikanan, kelompok Pekka, kelompok tani memiliki anggota yang saling beririsan.

Meskipun usaha BUMDes di sektor perikanan belum berjalan, pemerintah desa telah mengalokasikan dana senilai Rp50 juta dalam APBDes tahun 2019 untuk BUMDes. Dana tersebut diperuntukkan untuk dukungan penanaman modal, khususnya belanja peralatan mesin dan alat berat. Menurut Alim, staf pemerintahan desa, dana tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan pernikahan sebagai upaya memulai usaha BUMDes dalam bidang penyewaan alat pernikahan.

Usaha Persewaan Alat Pernikahan

Pembahasan terkait BUMDes untuk alat-alat persewaan alat pernikahan telah dibicarakan di dalam musyawarah desa. Usulan ini merupakan usulan BPD di tahun 2018 yang akan direalisasikan di tahun 2019. Untuk BUMDes Perikanan, perangkat mengaku belum memasukkan usulan tersebut dalam prioritas

⁴⁸ Wawancara Melati, Wali Amanah Koperasi “Banjar Harapan”, desa penelitian di HSU, 17 Juli 2019.

⁴⁹ Wawancara Melati, Wali Amanah Koperasi “Banjar Harapan”, desa penelitian di HSU, 17 Juli 2019; Wawancara Ambar, Sekretaris Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

pembangunan BUMDes.⁵⁰ Di dalam musyawarah tersebut telah disepakati bahwa anggaran Rp50 juta akan digunakan untuk pengadaan tenda pernikahan.

Peran kepala desa cukup besar dalam memengaruhi perkembangan BUMDes. Dukungan penuh dari kepala desa yang akomodatif mampu melancarkan pendirian BUMDes yang ditentang oleh beberapa anggota BPD yang pernah menjadi lawan politik Saiful dalam Pilkades 2014. Namun, hilangnya dukungan Saiful terhadap BUMDes sejak ia terjerat kasus narkoba, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi lambatnya perkembangan BUMDes, termasuk realisasi dana modal senilai Rp50 juta.⁵¹

Selain upaya merealisasikan anggaran, pengurus BUMDes dan pemerintah desa juga terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan BUMDes, misalnya dengan mengikuti pelatihan. Pada tanggal 22 dan 23 Juli 2019, pemerintah desa yang diwakili oleh staf pelayanan dan pengurus BUMDes yang diwakili oleh Hj. Aminah mengikuti pelatihan manajemen BUMDes di Amuntai. Dari pelatihan ini, Hj. Aminah belajar tentang penyertaan modal dan pengelolaan keuangan BUMDes. Peningkatan kapasitas menjadi hal yang penting dilakukan oleh pengurus BUMDes supaya memiliki kemampuan manajemen BUMDes.

Kelompok Madihin

Selain mengembangkan usaha ekonomi, kelompok Pekka juga aktif berkegiatan seni madihin sejak tahun 2016. Madihin merupakan kesenian tradisional dari Banjar dalam bentuk hiburan lisan dengan diiringi oleh gendang. Di desa ini, ada beberapa orang yang aktif berkesenian di antaranya yaitu Farah, Hj. Aminah, Hj. Rina, Rini dan Ambar. Mereka mengikuti lomba hingga tingkat kabupaten maupun provinsi, tampil dalam hari jadi kabupaten Hulu Sungai Utara dan dalam acara Yayasan PEKKA di Jakarta. Selain melestarikan kesenian tradisional, kelompok ini menyuarakan isu-isu perempuan dan kesetaraan gender melalui lirik-liriknya. Berbagai tema dijadikan lirik lagu madihin, misalnya tema Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tema perempuan, pendidikan, dll. Berikut ini contoh lirik yang ditulis oleh anggota kelompok perempuan Pekka:

*“Keluarga Pekka harus disayangi,
Dua kali lipat tidak punya ijazah dibanding laki-laki,
Dua kali lipat lebih buta huruf dari laki-laki,
Angka kematian pun lebih tinggi hanya karena persoalan reproduksi,
100 kematian terjadi pada di istri, karena masalah reproduksi,
Ayo ibu Pekka rame-rame ke Musrenbang agar suara kita didengarkan,
Begitu juga untuk Serikat Pekka jangan berkecil hati,
Ada 25 caleg Pekka yang mencalonkan diri,
Meskipun hanya 2 yang berhasil naik kursi berjuang untuk DPR 5 tahun lagi.”
(Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, 19 Juli 2019)*

Ketika tampil membawakan kesenian madihin, kelompok ini terkadang mendapatkan uang. Ketika mendapatkan uang yang biasanya berjumlah Rp1.500.000,00 maka akan dibagi rata untuk setiap anggota kelompok. Kelompok madihin di desa ini mendapatkan dukungan dari Saiful yang saat itu menjabat sebagai kepala desa, sebagaimana yang dituturkan oleh Hj. Aminah:

“Madihin itu kita ada latihan di kabupaten dulu. Jadi latihan-latihan di kabupaten itu kepala desa yang membawa mobil ke sana.” (Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019)

⁵⁰ Wawancara Gita, Kasi Pelayanan Desa, desa penelitian di HSU, 17 Juli 2019.

⁵¹ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

4.2. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa

Mendekatkan Pelayanan Publik di Tingkat Desa

PEKKA memiliki program untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat miskin, yaitu Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK). KLIK bertujuan memberikan layanan informasi dan konsultasi identitas hukum dan persoalan perkawinan dalam rumah tangga, serta persoalan perlindungan sosial.⁵² Di desa ini, sebagian besar masyarakat desa seringkali menghadapi hambatan geografis ketika harus mengurus identitas maupun program perlindungan sosial.⁵³ Oleh karena itu, KLIK menjadi program yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah.

Pada tanggal 1 Agustus 2017, perempuan yang tergabung dalam kelompok Pekka secara kolektif menyelenggarakan KLIK di desa ini. Berdasarkan penuturan Citra, belum semua masyarakat memiliki kartu identitas diri seperti KTP maupun Kartu Keluarga karena mereka belum memahami bahwa kartu identitas penting untuk mengakses program perlindungan sosial maupun untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.⁵⁴ PEKKA bekerja sama dengan beberapa dinas untuk penyelenggaraan KLIK, di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Kantor BPJS, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.⁵⁵ Ada beberapa jenis konsultasi perlindungan sosial yang dilakukan, yaitu kartu BPJS, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dari hasil konsultasi, tampak bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan konsultasi tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan dan akta lahir (KLIK, 2017). Setelah proses konsultasi ini, anggota kelompok Pekka bekerjasama dengan pemerintah desa menindaklanjuti hasil konsultasi ke dinas-dinas terkait.⁵⁶

Program KLIK diselenggarakan hanya sekali di desa ini. Konteks desa yang kecil dan jumlah penduduk yang sedikit, menjadikan administrasi kependudukan bukan menjadi persoalan besar di desa ini. Terlebih setelah adanya KLIK, pemerintah desa sangat kooperatif dalam memberikan pelayanan administrasi, baik melalui jalur formal maupun non formal. Secara formal, pengurusan administrasi dilakukan oleh staff pelayanan yang bersedia mengurus ke dinas terkait. Warga tidak perlu membayar untuk mendapatkan layanan KTP, kartu keluarga maupun BPJS. Secara non formal, kepala desa meminta anak perempuannya, Puty, untuk membantu mengurus dokumen administrasi warga. Warga juga tidak perlu membayar kepada Puty, sebab kebutuhan transportasi Puty untuk pergi ke instansi terkait sudah ditanggung oleh kepala desa. Namun, setelah kepala desa tidak lagi menjabat karena tertimpa suatu kasus, Puty tidak lagi membantu pengurusan administrasi kependudukan.

Akses terhadap Dana Desa

Partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa ini juga ditunjukkan dengan melihat kemampuan perempuan untuk memengaruhi penggunaan Dana Desa. Melalui Musdes, perempuan dapat mengusulkan berbagai kebutuhan perempuan untuk dimasukkan dalam anggaran desa. *Pertama*, usulan pengadaan alat pemeriksaan kesehatan untuk perempuan menunjukkan bahwa mereka telah memahami pelayanan kesehatan penting untuk masyarakat khususnya perempuan. Oleh karena itu, mereka mengusulkan pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Posyandu, yaitu berupa alat pengukur tensi dan alat pengecek kadar gula darah.⁵⁷

“Wah kalau sekarang ini kita langsung mengusulkan. [Kita bilang sama Kepala Desa] “Pak kami perempuan ini mau mengusulkan ini”. Yang pertama kami usulkan itu alat-alat kesehatan tahun 2016.” (Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, 15 Juli 2019)

⁵² <https://PEKKA.or.id/klik-PEKKA/>.

⁵³ Wawancara Puti, Putri mantan kepala desa, desa penelitian di HSU, 20 Juli 2019.

⁵⁴ Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

⁵⁵ Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

⁵⁶ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

⁵⁷ Wawancara Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka Tingkat Kabupaten, desa penelitian di HSU, 15 Juli 2019.

Usulan untuk pengadaan alat kesehatan juga menjadi perhatian Gita, Kasi Pelayanan Desa yang juga bekerja sebagai perawat di Puskesmas Kecamatan Sungai Pandan. Ia turut mengusulkan pengadaan alat kesehatan dan tempat tidur pasien untuk kebutuhan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Namun, usulan Gita tidak disampaikan secara terbuka dalam Musdes karena malu dan takut ditolak. Ia menyampaikan kepada aparat desa yang lain setelah Musdes selesai dilaksanakan.⁵⁸

Kedua, perempuan mendorong penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Posyandu anak, Posbindu (Pos Binaan Terpadu), dan Posyandu Lansia. Setelah adanya Dana Desa, pengelolaan Posyandu dikelola oleh desa dengan menggunakan Dana Desa sejak awal tahun 2019. Desa memberikan biaya operasional sebesar Rp180.000,00 setiap bulan. Dana ini digunakan untuk membeli konsumsi dan *doorprize*. Sedangkan untuk kader Posyandu, pemerintah desa memberikan honor Rp100.000,00 /orang untuk setiap bulan. Menurut Bu Cahaya yang telah menjadi kader posyandu sejak 5 tahun lalu, kader posyandu juga dilibatkan dalam Musdes.⁵⁹

Ketiga, perempuan berhasil mendapatkan alat kesenian berupa kendang dari pemerintah desa. Alat kesenian ini penting untuk menunjang kebutuhan perempuan yang aktif dalam kelompok madihin. Madihin merupakan kesenian tradisional Banjar. Kelompok yang sebagian besar merupakan anggota kelompok Pekka ini telah berkiprah hingga level kecamatan, kabupaten dan nasional. Saiful, ketika menjabat kepala desa juga sangat mendukung kelompok ini, yaitu ditunjukkan dengan kemauannya mengantar kelompok madihin ketika mengikuti lomba di kecamatan.⁶⁰

Keterwakilan Perempuan dalam Musyawarah Desa

Pada dasarnya, kebijakan nasional telah mengatur keterlibatan perempuan dalam Musdes melalui UU No. 6 Tahun 2014 pasal 54 yang menyebutkan bahwa kelompok perempuan sebagai bagian unsur masyarakat dapat mengikuti Musdes untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam Musdes, PEKKA Kalimantan Selatan mendorong pemerintah desa untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang keterlibatan perempuan dalam Musrenbang, yang terwujud melalui adanya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa No 5 Tahun 2019 tentang Pelibatan Perwakilan Organisasi Perempuan Dalam Musrenbangdes Kecamatan Sungai Pandan.⁶¹

Serikat Pekka di desa dan Pendamping Lapangan PEKKA berperan pada upaya terbitnya SK ini. Dalam kunjungannya bulan Juli-Agustus 2019 di Hulu Sungai Utara, Citra yang menjabat sebagai Pendamping Lapangan PEKKA mendekati kepala desa. Pada 11 Juli 2019, ia dan Hj. Aminah meminta bantuan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa untuk mengeluarkan SK yang terkait dengan izin keterlibatan Pekka dalam Musdes. Pjs Kades pun menyambut baik usulan dari PEKKA dengan mengeluarkan SK Kepala Desa No. 5 Tahun 2019 tentang Pelibatan Perwakilan Organisasi Perempuan Dalam Musrenbangdes Kecamatan Sungai Pandan. SK yang dikeluarkan pada 22 Juli 2019 ini mendorong pemerintah desa untuk menetapkan nama-nama organisasi perempuan yang dapat mengirimkan perwakilan dalam Musrenbang.⁶² Selain itu, mereka juga mendorong Musrenbang agar mempertimbangkan usulan organisasi perempuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dalam lampiran SK tersebut, disebutkan bahwa Serikat Pekka yang diketuai oleh Hj. Aminah, PKK yang diketuai oleh Ambar dan Posyandu yang diketuai oleh Farah, sebagai organisasi yang dapat mengikuti Musrenbangdes.

⁵⁸ Wawancara Gita, Kasi Pelayanan Desa, desa penelitian di HSU, 17 Juli 2019.

⁵⁹ Wawancara Cahaya, Kader Posyandu Balita, desa penelitian di HSU, 12 Juli 2019.

⁶⁰ Wawancara Farah, Ketua Kelompok Setia Kawan, desa penelitian di HSU, 13 Juli 2019.

⁶¹ Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

⁶² Wawancara Citra, pendamping lapangan PEKKA, desa penelitian di HSU, 11 Juli 2019.

Penutup

Dari uraian di atas, ada beberapa catatan penting terkait dengan penguatan gerakan perempuan di tingkat desa. *Pertama*, upaya pemberdayaan ekonomi merupakan strategi yang efektif untuk mendorong keaktifan masyarakat dalam berkelompok. Kegiatan kelompok ini kemudian menjadi wadah berbagai kegiatan untuk peningkatan kapasitas perempuan, tidak hanya agar berdaya secara ekonomi, namun juga secara politik.

Kedua, perempuan desa mengalami peningkatan kapasitas, baik dalam pengetahuan, keterampilan, kemampuan berorganisasi, jaringan yang dimiliki, dukungan kelompok, serta pilihan mata pencaharian, dengan dukungan eksternal dari PEKKA. Sebelum PEKKA masuk, perempuan menghadapi kemelut dari sisi ekonomi maupun partisipasi politik. Selain itu, perempuan juga tidak memiliki wadah untuk berorganisasi. Melalui program-program PEKKA yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan, perempuan desa secara antusias membentuk kelompok simpan pinjam dan belajar untuk berorganisasi. Selain itu, beberapa perempuan juga memanfaatkan Akademi Paradigta sebagai ruang belajar baik secara teoritis maupun praktis. Dari sinilah kemudian perempuan memiliki kepercayaan diri, kemampuan yang memadai untuk berorganisasi, melakukan advokasi, maupun berkontribusi mengembangkan perekonomian desa.

Ketiga, perempuan tidak hanya mengalami perubahan di level individu, tetapi juga meluasnya jaringan dukungan yang mereka miliki dengan bekerja sama dengan perempuan lain serta tokoh masyarakat lain yang berpengaruh. Jaringan dukungan ini memperkuat peran kolektif perempuan dalam memengaruhi kebijakan desa. Perdes tentang BUMDes yang disahkan pada 2015, menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi desa. Pembentukan BUMDes inipun seiring dengan salah satu agenda pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam rangka mendorong penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi. Meskipun mengalami stagnasi hingga tahun 2019 karena Dana Desa diprioritaskan untuk infrastruktur, kelompok perempuan terus berusaha mendorong pengembangan BUMDes. Selain menginisiasi BUMDes, kelompok perempuan juga berhasil mengakses Dana Desa untuk kebutuhan perempuan, misalnya pengadaan alat kesehatan dan alat kesenian. Sedangkan untuk memastikan partisipasi perempuan dalam Musdes, PEKKA memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk mengeluarkan SK keterlibatan organisasi perempuan dalam Musdes. Pelembagaan partisipasi perempuan dalam bentuk regulasi penting untuk meminimalkan pengekklusian perempuan dalam proses pembuatan kebijakan.

Bibliografi

- Antarnews.com, 2010. Tingkat Perceraian Tinggi, diakses 23 Januari 2020: <
<https://kalsel.antarnews.com/berita/560/tingkat-perceraian-tinggi- diakses tanggal 20 Januari 2020>>.
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2019. Daftar Daerah Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun, diakses 18 Oktober 2019: <http://datin.kemendesa.go.id/simpورا/report_tertinggal_ipdsmry.php?start=7>.
- KLIK, 2017. Dokumen KLIK di Kelompok Pekka, tidak dipublikasikan.
- PEKKA, 2018a. Latar Belakang, diakses 23 Januari 2020:< <https://PEKKA.or.id/latar-belakang/>>.
- PEKKA, 2018b. Ekonomi dan Penghidupan Berkelanjutan, diakses 30 Januari 2020:< <https://PEKKA.or.id/ekonomi-dan-penghidupan-berkelanjutan/>>.
- PEKKA, 2018c. Akademi Paradigta, diakses 30 Januari 2020:< <https://PEKKA.or.id/akademi-paradigta/>>.
- Pemerintah Desa, 2015a. Dokumen RPJM Desa Tahun 2016-2021.
- Pemerintah Desa, 2015b. Dokumen Perdes BUMDes Tahun 2015.
- Tempo.co, 2017. Proyek Dana Desa Wajib Dilakukan Secara Swakelola, diakses 23 Januari 2020:
<<https://nasional.tempo.co/read/1044549/proyek-dana-desa-wajib-dilakukan-secara-swakelola>, diakses 23 Januari 2020>.